

**ISU PERDAGANGAN DAN INDUSTRI
SEBAGAI KEBIJAKAN STRATEGIS DAERAH
DALAM MENGAHADAPI GLOBALISASI
DAN LIBERALISASI**

Editor:

Rusdy Syahra, Ph.D

**Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
2011**

Judul:

Isu Perdagangan dan Industri Sebagai Kebijakan Strategis Daerah dalam
Menghadapi Globalisasi dan Liberalisasi

Editor:

Rusdy Syahra, Ph.D

Perancang Sampul:

Ahans Mahabbie

Perancang Tata Letak:

Sony Sifatira

Cetakan Pertama, 2011

Penerbit:

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia

ISBN: XXXXXXXXX

Alamat Penerbit:

Gedung Nusantara I Lt. 2
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270
Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Dengan semakin terbukanya perekonomian Indonesia dan adanya berbagai kesepakatan antar negara dalam era globalisasi sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional dan daerah. Dalam lingkup globalisasi ekonomi dimana perekonomian dan seluruh aspek didalamnya meluas melampaui batas-batas antar negara. Globalisasi ekonomi termasuk perdagangan dan jasa saat ini, khususnya di Indonesia bisa dikatakan belum berdampak positif seperti yang diharapkan bagi perekonomian secara keseluruhan. Fakta umum mengindikasikan masih banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam menghadapi tantangan tersebut dan banyak daerah-daerah yang notabene merupakan kawasan yang sangat terbuka, masih banyak hidup di dalam kemiskinan serta pengangguran akibat ketimpangan perekonomian, serta fakta-fakta lainnya. Untuk membahas masalah-masalah tersebut ada kajian dan beberapa hasil penelitian yang dapat menggambarkan kondisi dihadapi dalam era globalisasi dibahas dalam beberapa bagian buku dengan tema utama **”Isu Perdagangan Dan Industri Sebagai Kebijakan Strategis Daerah Dalam Menghadapi Globalisasi Dan Liberalisasi ”**

Bagian pertama buku kajian ini akan ditulis oleh **Sdr. Mandala Harefa** yang mengambil topik tentang **“Disparitas Ekonomi Antar Wilayah dan Kebijakan Pengembangan Pusat Pertumbuhan”** Topik ini tentunya merupakan isu strategis mengingat berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah ternyata tidak sepenuhnya berdampak positif bagi daerah yang minim potensi SDA nya. Tujuan dari pembangunan ekonomi merupakan upaya negara agar berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Selama kurun waktu yang cukup panjang, pembangunan nasional telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti, namun sekaligus juga mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani diantaranya masih terdapatnya disparitas atau ketimpangan antar daerah. Kebijakan dan Strategi pembangunan ekonomi di masa lalu telah mengubah struktur ekonomi secara mengesankan dan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

yang pada era globalisasi telah bergeser pada sektor Industri dan perdagangan. Namun, perubahan struktur ekonomi ini hanya terjadi pada level nasional, sedangkan pada level daerah secara agregat relatif stagnan, terutama daerah-daerah di luar pulau Jawa. Ini berarti bahwa peranan dan partisipasi daerah dalam pembangunan ekonomi nasional belum optimal.

Selama ini, strategi pembangunan ekonomi yang diterapkan Indonesia telah berhasil mengubah struktur ekonominya, dari struktur ekonomi yang semula didominasi oleh sektor pertanian menjadi struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor industri manufaktur terlebih semakin terbukanya perekonomian melalui investasi asing. Seiring dengan itu, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mencapai tingkat yang cukup tinggi.

Namun demikian perubahan struktur ekonomi dan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai Indonesia pada masa itu terjadi pada level nasional; sedangkan pada level daerah setelah otonomi, tidak semua daerah memperoleh manfaat dari strategi tersebut terjadi disparitas, terutama daerah-daerah di luar pulau Jawa. Bahkan strategi yang diterapkan tersebut, secara bertahap telah memperlebar kesenjangan ekonomi antara pulau Jawa dengan pulau-pulau besar lainnya, antar provinsi dan antar kabupaten.

Masalah klasik dan mendasar terjadinya ketimpangan ekonomi tersebut potensi ekonomi yang tidak sama. Ada beberapa wilayah atau provinsi yang memiliki berbagai sumber daya alam berlimpah, tidak akan mengalami permasalahan dalam membangun kegiatan ekonomi sebagai pusat pertumbuhan, Namun, tidak dapat dipungkiri, masih banyak wilayah selain tidak memiliki SDA, dan kondisi lahannya banyak kering. Namun demikian, adanya wilayah yang tidak didukung kondisi alam yang memadai untuk kegiatan pertanian, namun memiliki posisi strategis dan memperoleh bantuan secara maksimal dari pemerintah pusat untuk dibentuk sebuah kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (*growth pole*).

Tulisan **Sdr. Asep Ahmad Saefuloh** akan mengisi bagian *kedua* buku kajian ini. Tulisannya akan membahas isu. **Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Sektor Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bali**. Masalah ini merupakan salah satu isu yang sangat strategis yang keterkaitannya sangat erat bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan. Saat ini dunia sedang berada pada era globalisasi, dimana perdagangan antar negara bergerak ke arah perdagangan bebas. Indonesia sebagai bagian dari komunitas dunia tidak bisa menghindari dari kenyataan tersebut. Terutama sekali, tantangan pasar bebas semakin nyata setelah tanggal 1 Januari 2010 perdagangan bebas ASEAN

-China *Free Trade Area* atau ACFTA dinyatakan mulai berlaku. Konsekuensi dari keberadaan ACFTA adalah produk China akan semakin membanjiri pasar domestik dengan harga kompetitif. China dapat menghasilkan produk kompetitif dikarenakan produktivitas pekerjanya sangat tinggi. Sementara bagi Indonesia, sesuai dengan catatan ILO, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih berada di peringkat 59 dunia jauh di bawah produktivitasnya masih rendah dibandingkan negara-negara pesaing. Sebagai suatu perbandingan, Korea berada pada peringkat 29, dan China peringkat 31.

Salah satu persoalan yang menjadi kendala sektor industri yang menurunkan daya saing adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM). Hal ini terkait dengan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja, disamping kendala lain seperti ketergantungan terhadap bahan baku serta komponen impor dan mesin-mesin produksi yang sudah tua. Penjelasan di atas senada dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dimana untuk menjaga daya saing kedepan, diperlukan perbaikan infrastruktur untuk menyelesaikan masalah logistik dan penyediaan energi listrik dan gas, serta penciptaan iklim investasi dengan mempersiapkan SDM yang produktif, serta menekan biaya yang tidak kompetitif, dan menyelesaikan regulasi ketenagakerjaan.

Sejalan dengan adanya Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010 ada 2 (dua) prioritas RUU bidang ekonomi yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan dalam suatu kegiatan perekonomian yaitu sektor industri dan sektor perdagangan. *Pertama*, DPR-RI telah menetapkan RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. *Kedua*, adanya RUU tentang Perdagangan yang diajukan oleh pemerintah.

Hal ini tentunya harus direspon oleh DPR RI melalui regulasi dalam rangka meminimalisir dampak dari liberalisasi perdagangan dunia dalam konteks globalisasi pasar. Terlebih sektor perdagangan pada saat ini dan masa depan dihadapkan pada tantangan menuju liberalisasi dan globalisasi perdagangan yang efisien dan efektif, sehingga dapat menggerakkan ekonomi nasional dan perekonomian daerah/lokal. Begitu juga momentum ini dapat digunakan untuk melakukan pembenahan SDM di bidang perindustrian dan perdagangan. Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan SDM di sektor industri dan perdagangan perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap SDM di sektor industri dan perdagangan tersebut. Untuk keperluan studi maka dilakukan studi dengan mengambil Provinsi Bali sebagai suatu

studi kasus. Pemilihan Bali ini dikarenakan Bali memiliki faktor kekhasan (*endowment*) yang diharapkan akan menjadi nilai positif dalam menghadapi persaingan kedepan

Bagian ketiga buku kajian ini akan ditulis oleh Sdr. **Ahmad Sani Alhusain** yang mengambil topik tentang **Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Memperkuat Perdagangan Luar Negeri Pasca Pemberlakuan Asean-China Free Trade Area (ACFTA) yang mengambil Studi di Provinsi Bali**. Isu ini merupakan telah mengemuka sejak awal tahun, mengingat tantangan era pasar bebas semakin nyata setelah tanggal 1 Januari 2010 perdagangan bebas (*Free Trade Area*) ASEAN-China atau AC-FTA dinyatakan mulai berlaku. Adanya kebijakan perdagangan bebas ini cenderung dapat mengancam eksistensi industri dan perdagangan dalam negeri. Hal ini ditandai dengan semakin membanjir produk China dengan harga yang semakin murah. Tentu saja harga yang semakin murah tersebut menjadikan produk China semakin digemari oleh konsumen dalam negeri.

Kebijakan AC-FTA sendiri melibatkan enam negara di kawasan ASEAN, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Selanjutnya di tahun 2015, negara-negara lain di kawasan ASEAN seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam juga akan terlibat dalam perdagangan bebas tersebut.

Pemberlakuan AC-FTA tersebut mendapat tanggapan dari banyak pihak, terutama dari pelaku usaha. Tanggapan dari pelaku usaha, seperti yang disampaikan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI menilai bahwa kebijakan AC-FTA sangat riskan karena ketidakseriusan dalam persiapannya dan lebih lanjut dijelaskan bahwa AC-FTA akan mengancam sejumlah kawasan industri. Padahal China sendiri sudah mempersiapkan sejak 8 sampai 10 tahun lalu, sedangkan Indonesia cuma dalam hitungan bulan.

Hal ini tentunya akan menjadi perhatian pengusaha-pengusaha di daerah untuk bersaing dengan produk luar khususnya dari China. Disamping itu, untuk meningkatkan daya saing produk lokal dalam era perdagangan bebas ini, bukan hanya pemerintah pusat tetapi pemerintah daerahpun dituntut untuk mempersiapkan diri agar dapat memberi dukungan bagi pengusaha daerahnya untuk mengembangkan diri dan meningkatkan daya saing produk perdagangannya.

Bagian *keempat* buku kajian ini akan ditulis oleh Sdr. **Suhartono** yang mengambil topik tentang **Peran Pemerintah dalam Mengelola Perdagangan: Studi di Provinsi Bali**. Isu yang mengambil studi daerah Provinsi Bali, dengan

potensi pariwisatanya, telah berkembang menjadi pusat perdagangan produk Indonesia kepada pembeli dari mancanegara. Selain itu, perkembangan pariwisata yang melibatkan industri pariwisata internasional dan banyaknya kunjungan wisatawan mancanegara menyebabkan meningkatnya permintaan akan produk impor sesuai kebutuhan industri pariwisata dan wisatanya. Posisi ini memberikan tempat yang strategis dari Bali dalam konteks perdagangan bebas. Perkembangan perdagangan yang pesat tersebut memberikan tantangan tersendiri bagi peran pemerintah dalam mengelola daerahnya. Bali bukan wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas, tetapi arus perdagangan barang dan jasa memiliki kemiripan dengan kawasan FTZ. Dalam hal ini bagaimana pemerintah Bali mengelola wilayahnya dalam konteks perdagangan bebas menjadi studi yang menarik dalam memproyeksikan lebih jauh peran pemerintah dalam mengelola perdagangan.

Pada bagian kelima, buku kajian ini akan ditulis oleh Sdr. Juli Panglima Saragih yang akan membahas isu tentang **"Analisis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Dan Implikasinya Terhadap Ekspor-Impor Provinsi Kepulauan Riau"**. Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan dan merupakan isu yang sangat strategis bagi daerah, terutama provinsi Kepri, sektor perdagangan, khususnya perdagangan luar negeri merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian saat ini. Sektor perdagangan berkaitan erat dengan aspek kebijakan/peraturan perundang-undangan, tidak hanya kebijakan pemerintah pusat tetapi juga kebijakan pemerintah daerah. Aspek lainnya adalah aspek kelembagaan dan aspek politik luar negeri. Aspek kebijakan dalam perdagangan luar negeri (ekspor-impor) sangat berpengaruh terhadap kegiatan perdagangan luar negeri.

Perdagangan luar negeri saat ini juga tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Tuntutan liberalisasi pasar sudah semakin nyata. Artinya setiap negara harus membuka pasar domestiknya terhadap produk-produk dari luar negeri. Setiap negara juga semakin terbuka terhadap berbagai informasi, termasuk informasi yang berkaitan dengan pasar. Oleh karena kegiatan perdagangan luar negeri adalah kegiatan ekonomi, maka pasar pun harus semakin terbuka dan sedikit mungkin timbul hambatan dalam perdagangan luar negeri.

Sebelum globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia muncul, banyak negara yang masih menerapkan suatu kebijakan atau peraturan perdagangan luar negerinya seperti membatasi impor dengan sistem kuota. Ada negara yang menerapkan tarif impor yang cukup tinggi terhadap suatu jenis barang

tertentu. Negara lain menerapkan kebijakan non-tariff di bidang perdagangan luar negeri yakni dengan melokalisasi pasar.

Dalam kerangka liberalisasi perdagangan dunia, setiap negara kini cenderung melakukan kerja sama perdagangan secara bilateral (perjanjian kerja sama perdagangan bebas secara bilateral atau *free trade agreement*). Sektor perdagangan tidak hanya menjadi kepentingan pemerintah pusat semata, tetapi juga partisipasi atau peran aktif pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Kepentingan pemerintah daerah semakin meningkat khususnya di era globalisasi dan liberalisasi perdagangan dalam konteks ekspor-impor yang dilakukan oleh daerah. Artinya daerah ikut bertanggung jawab dalam meningkatkan nilai kontribusi perdagangan luar negeri terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan, serta ekonomi daerah.

Dalam kaitan ini pemerintah pusat dan daerah harus dapat membuat kebijakan perdagangan luar negeri yang benar-benar mendukung sektor perdagangan terhadap perekonomian secara keseluruhan. Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah yang juga berkepentingan terhadap perdagangan luar negeri, khususnya ekspor-impor. Kecenderungan globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia sedikit banyak akan mempengaruhi perekonomian daerah, termasuk perekonomian di daerah Kepulauan Riau. Daerah Kepulauan Riau sampai saat ini juga melakukan kegiatan perdagangan luar negeri, di samping kegiatan industri dan investasi asing. Hal ini juga didukung dengan penetapan Batam, Bintan dan Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Perkembangan Kepulauan Riau, khususnya Batam tidak dapat dilepaskan dari kegiatan perdagangan, khususnya ekspor dan impor.

Masalah globalisasi perekonomian merupakan tantangan yang tidak dapat dihindari oleh Indonesia termasuk wilayah dan daerah harus siapa. Dengan perkembangan yang terakhir telah tampak indikasi bahwa para pelaku ekonomi pada sector industri diberbagai wilayah mulai mengeluh. Untuk itu DPR dan Pemerintah seharusnya telah menyusun strategi dalam menghadapi berbagai implikasi dari kondisi tersebut dimana akan semakin tingginya ketimpangan ekonomi antar wilayah dan tegrusnya sector-sector industri akibat tidak mampu bersaing dalam era globalisasi.

Jakarta, September 2011

Editor,
Rusdy Syahra, Ph.D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	ix
BAGIAN 1	
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN KESENJANGAN EKONOMI ANTAR WILAYAH.....	1
<i>Oleh: Mandala Harefa</i>	
BAB I PENDAHULUAN	3
BAB II KONSEP DAN INDIKATOR KETIMPANGAN EKONOMI.....	9
BAB III STRUKTUR EKONOMI DAN KETIMPANGAN ANTAR DAERAH DI INDONESIA.....	19
BAB IV PENUTUP	35
DAFTAR PUSTAKA.....	37
BAGIAN 2	
KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DALAM SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI.....	39
<i>Oleh: Asep Ahmad Saefuloh</i>	
BAB I PENDAHULUAN	41
BAB II METODOLOGI PENELITIAN.....	47
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN.....	49
BAB IV PEMBAHASAN.....	53
BAB V PENUTUP	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

BAGIAN 3

PERDAGANGAN BEBAS DAN PARIWISATA: PERANAN PEMERINTAH DAERAH DAN PELAKU USAHA DI PROVINSI BALI 75

Oleh: Suhartono

BAB I PENDAHULUAN 77

BAB II HUBUNGAN ANTARA PARIWISATA DAN PERDAGANGAN 85

BAB III PERAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI 89

BAB IV PERAN PEMERINTAH DAN PELAKU USAHA 93

BAB V TANTANGAN ACFTA TERHADAP PERDAGANGAN BALI... 101

BAB VI PENUTUP 105

DAFTAR PUSTAKA 107

BAGIAN 4

PERKEMBANGAN DAN UPAYA PENINGKATAN PERDAGANGAN EKSPOR IMPOR PROVINSI BALI MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL 109

Oleh: Achmad Sani Alhusain

BAB I PENDAHULUAN 111

BAB II PARTISIPASI DALAM PERDAGANGAN GLOBAL: IMPLIKASI, MANFAAT DAN KEBIJAKAN 115

BAB III PERKEMBANGAN PERDAGANGAN EKSPOR DAN IMPOR PROVINSI BALI 119

BAB IV KENDALA PERDAGANGAN EKSPOR DAN IMPOR PROVINSI BALI 129

BAB V KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM UPAYA MENINGKATKAN PERDAGANGAN EKSPOR DAN IMPOR 133

BAB VI PENUTUP 137

DAFTAR PUSTAKA 139

BAGIAN 5	
KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM MENGHADAPI LIBERALISASI DAN GLOBALISASI PERDAGANGAN	141
<i>Oleh: Juli Panglima Saragih</i>	
BAB I PENDAHULUAN	143
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	149
BAB III PEMBAHASAN	153
BAB IV PENUTUP	163
DAFTAR PUSTAKA	165
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	167

